

Title : Refleksi Ekonomi 76 Tahun Indonesia
Author(s) : Mirna Amirya
Institution : Brawijaya University
Category : Opinion, Competition
Topic : Economy

Refleksi Ekonomi 76 Tahun Indonesia

Oleh: Mirna Amirya¹

Pembukaan UUD 1945, Alinea Empat:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Refleksi atas Realitas

Inti dari kedaulatan rakyat sesungguhnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mohammad Hatta, Wakil Presiden Pertama RI menyampaikan bahwa “Inti dari kedaulatan rakyat sesungguhnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Pernyataan Beliau sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kedaulatan rakyat merupakan prasyarat penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat.

Intervensi pemerintah dapat menciptakan keadilan sosial. Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak sosial yang mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Harapannya, keadilan sosial akan terwujud seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Namun ada kalanya, cita-cita mulia yang telah ditetapkan tidak berjalan beriringan dengan realitasnya. Salah satu problematika dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia yaitu dalam hal **ekonomi** sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah

Salah satu kunci penting untuk memajukan Indonesia yaitu terletak pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan SDM menjadi salah satu fokus utama pembangunan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Bila hal ini tidak dilakukan dengan tepat maka kualitas SDM akan menjadi permasalahan yang mengikat (*binding constraint*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Apalagi Indonesia akan memperoleh bonus demografi di mana proporsi penduduk di usia produktif lebih banyak. Sehingga pemerintah diharapkan dapat mempersiapkan strategi yang baik dan optimal akan potensi ini sehingga tidak akan menjadi bencana demografi.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (2021), salah satu penghambat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia potensial jangka menengah dan panjang adalah

¹ Penulis adalah pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang. Saat ini sedang menyelesaikan studi doktoral di R.R. China.

kualitas sumber daya manusia. Jadi salah satu hal yang harus diperbaiki dalam sumber daya yaitu kualitas pendidikan rendah.

Tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-14 dari 17 negara South East Asia, East Asia, dan Oceania (SEAO) dan peringkat ke-85 dari 131 negara dalam *Global Innovation Index 2020*. Urutan ini tidak berubah sejak tahun 2018. Salah satu faktor yang berpengaruh dari rendahnya *Global Innovation Index* Indonesia karena rendahnya kualitas dan kuantitas riset. Semakin tinggi indeks inovasi suatu negara akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dari negara tersebut sehingga inovasi menjadi satu faktor penting untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan PDB per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dan pendidikan ternyata berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tentunya adalah kualitas sumber daya manusia.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2021), untuk mengukur daya saing sebuah indikator yang dimiliki negara-negara, terdapat dua indeks yaitu *Global Competitiveness Index Ranking* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) dan *Global Innovation Index* (GII) yang dikeluarkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO). GII telah menjadi salah satu referensi terkemuka untuk mengukur kinerja inovasi ekonomis serta tingkat perkembangannya menjadi alat pembanding berharga yang dapat memfasilitasi dialog publik atau swasta di mana para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengevaluasi kemajuan inovasi dari suatu negara setiap tahunnya.

Berdasarkan penilaian *Global Innovation Index*, skor tinggi Indonesia ada dalam 4 pilar dari 7 pilar, yaitu (1) Infrastruktur, (2) kecanggihan pasar, (3) keluaran pengetahuan dan teknologi, (4) keluaran kreatif. Sebaliknya, Indonesia berada di bawah rata-rata pada 3 pilar yaitu, (1) institusi, (2) sumber daya manusia dan penelitian, dan (3) kecanggihan bisnis. Tantangan selanjutnya tentunya tidak hanya sekedar mengirimkan data untuk meningkatkan skor *Global Innovation Index* saja, namun juga harus memperhatikan performa yang baik.

Pola Pikir dan Budaya Inovasi Masih Lemah

Perkembangan inovasi masih menjadi kendala di Indonesia. Salah satu faktor utamanya adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Inovasi mendorong peningkatan daya saing negara untuk menghasilkan produk bernilai tambah berbasis riset. Namun program penguatan inovasi di Indonesia belum berkelanjutan dan minim dampak karena belum menasar pola pikir dan budaya. Persoalannya, Pemerintah belum memiliki pola pikir dan budaya inovatif. Padahal, Pemerintah adalah faktor penting untuk memungkinkan industri menghasilkan produk berdaya saing.

Berdasarkan survei *World Competitiveness Yearbook* (WCY) 2021 yang dilakukan oleh *Institute Management Development* (IMD), daya saing Indonesia berada di peringkat ke 37 dari total 64 negara. Survei terbaru ini menunjukkan adanya peningkatan peringkat Indonesia dari posisi tahun lalu yang ada di peringkat 40. Walaupun secara total peringkat Indonesia mengalami peningkatan, namun peringkat masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Peringkat daya saing Indonesia rendah karena kualitas SDM masih rendah.

Gambaran realitas yang kontras ini dapat kita cerna dari informasi yang disampaikan oleh pakar dan pelaku Proyek Kerjasama Perdagangan Uni Eropa Indonesia (European Union-Indonesia Trade Cooperation Facility/TCF) tahun 2016 lalu, di mana Balai Besar Logam dan Mesin di

Bandung yang merupakan milik Kementerian Perindustrian, seharusnya diharapkan mampu membina industri logam dan mesin berinovasi guna meningkatkan nilai tambah. Nyatanya, kemampuan inovasi balai tersebut *malah* di bawah industri yang seharusnya dibina. Bahkan, menurut mereka, ide dasar Presiden Joko Widodo terkait inovasi agar hasil riset bermanfaat menjadi produk komersial sudah bagus. Namun, *leader* lemah dalam menerjemahkan ide agar dapat diterapkan secara efektif. Banyak hasil riset tidak terserap industri karena peneliti tidak menyesuaikan kebutuhan industri. Bahkan, komunikasi antara lembaga riset dan industri pun juga dinilai sangat kurang.

Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Begitu juga dengan pembangunan infrastrukturnya. Bahkan oleh dunia internasional, Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Namun tetap menyisakan pertanyaan mendasar: Masih tersisakah semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan dalam kehidupan berbangsa?

Masalah “ketimpangan ekonomi” pun juga masih terus muncul dan belum terselesaikan. Ketimpangan tidak hanya dilihat dalam konteks pendapatan dan kekayaan. Di sisi lain, masih terdapat isu pemerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan antardaerah dan antarwilayah. Kenyataannya, kegiatan ekonomi masih banyak yang terpusat di Pulau Jawa.

Indonesia belum menerapkan sistem ekonomi Pancasila karena sistem yang berlangsung saat ini yaitu melalui mekanisme pasar. Konsekuensi penerapan sistem ekonomi pasar yaitu adanya fasilitasi kepentingan segelintir orang atau kelompok, tetapi mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Aspek-aspek kesenjangan dan pemerataan pembangunan belum menjadi fokus perhatian. Sehingga pembangunan mengalami ketimpangan dan dapat berakibat buruk terhadap perwujudan keadilan sosial di Indonesia.

Untuk mengatasi berbagai problematika dan tantangan ekonomi tersebut, maka terdapat beberapa **strategi** yang dapat diterapkan, antara lain:

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Adapun dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya, antara lain, **Pertama, implementasi program edukasi berkualitas tinggi.** Program Pendidikan tersebut tidak hanya memberikan materi pelajaran tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik seperti kepercayaan diri, komunikasi, kerjasama, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, inovasi dan kreativitas, dan sebagainya. Selain itu juga perlu diperkenalkan dengan perkembangan dunia teknologi agar *melek* teknologi sehingga mampu berinovasi dan berdaya saing dengan negara lain. **Kedua, dukungan untuk para guru/tenaga pengajar dan peserta didik.** Dukungan yang dapat diberikan antara lain berupa pelatihan, pemerataan infrastruktur pendidikan antar daerah, dan bantuan dana atau beasiswa.

Kerjasama Berbagai Pihak

Indonesia adalah negara besar dengan potensi SDM yang berlimpah. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dibutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, kunci stabilitas, dan penggerak. Akademisi berperan dalam bagaimana mencari kunci-kunci dan inovasi ilmu pengetahuan.

Industri sebagai pemicu inovasi dari sisi produksi. Sedangkan masyarakat berperan baik sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila

Masalah “ketimpangan ekonomi” yang dihadapi oleh Indonesia merupakan titik tolak yang menciptakan sebuah urgensi untuk melandaskan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan berbagai jenis kebijakan oleh pemerintah. Dalam konteks ekonomi, keadilan dapat terwujud melalui sistem distribusi yang baik.

Prakteknya saat ini, terdapat ketimpangan yang begitu signifikan antara segelintir pemilik modal (atas modal material seperti tanah, uang, dan mesin) dengan mayoritas masyarakat pada umumnya. Sistem Ekonomi Pancasila mengatur bagaimana redistribusi aset material sebagai salah satu faktor produksi menjadi lebih adil demi menyokong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila ini yaitu dijiwai oleh asas kekeluargaan, kegotongroyongan dan kerja sama.

Simpulan

Beberapa problematika dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia yaitu dalam hal ekonomi antara lain yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah, Pola Pikir dan Budaya Inovasi Masih Lemah, dan Ketimpangan Ekonomi. Untuk mengatasi berbagai problematika dan tantangan ekonomi tersebut, maka terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan, antara lain yaitu Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kerjasama Berbagai Pihak, dan Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila.